



## PERENCANAAN PARIWISATA PERBATASAN DI KELURAHAN SEKANAK RAYA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERBATASAN

Ady Muzwardi<sup>1</sup>, Oksep Adhayanto<sup>2</sup>, Herry Wahyudi<sup>3</sup>, Casiavera<sup>4</sup>, Abdul Hamid Jalaludin<sup>5</sup>, Fitria Nur Lisdaningrum<sup>6</sup>, Basyaruddin Idris<sup>7</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

Corresponding Author: [herrywahyudi@umrah.ac.id](mailto:herrywahyudi@umrah.ac.id)

### Info Artikel

#### Article History;

Submitted: 11-09-2023

Accepted: 25-06-2024

Published: 29-07-2024

#### Kata Kunci:

Pariwisata; Perbatasan;  
Gastrodiplomasi

#### Abstrak:

Provinsi Kepulauan Riau tergolong salah satu *cross border tourism* yang paling potensial di Indonesia. Potensi pariwisata perbatasan di Kepulauan Riau memiliki ciri khas dengan potensi pariwisata perbatasan daerah lainnya di Indonesia. Ciri khas nya yaitu terdiri atas pulau-pulau. Pulau Batam dan Bintan telah menjadi destinasi perbatasan yang dikenal di Provinsi Kepulauan Riau, namun dalam implementasinya, konsep pariwisata perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau belum menemukan titik temu pada tahapan konsep border tourism dan gastrodiplomacy. Menyadari potensi dan permasalahan di bidang perbatasan, kelautan dan perikanan tersebut maka saat ini sudah mulai ada perubahan paradigma terhadap pengelolaan sumberdaya perbatasan, kelautan dan perikanan, yang semula memanfaatkannya berfokus pada objek penelitian dan wahana pemersatu, kini berkembang menjadi paradigma pembangunan. Artikel ini akan membahas mengenai kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan optimalisasi potensi pariwisata perbatasan melalui konsep gastrodiplomasi yang ada di Kelurahan Sekanak Raya. Metode yang dilakukan ialah memberdayakan masyarakat perbatasan di Kelurahan ini dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi perbatasan yang ada secara gastrodiplomasi melalui diskusi kelompok kecil (FGD).

#### Abstract:

*Riau Islands Province is classified as one of the most potential cross border tourism areas in Indonesia. The potential for border tourism in the Riau Islands has unique characteristics with the potential for border tourism in other regions in Indonesia. Its distinctive feature is that it consists of islands. Batam and Bintan Islands have become well-known border destinations in the Riau Islands Province, but in its implementation, the concept of border tourism in the Riau Islands Province has not yet found a common ground at the border tourism and gastrodiplomacy concept stages. Realizing the potential and problems in the border, maritime and fisheries sector, currently there has begun to be a paradigm shift in the management of border, marine and fisheries resources, which initially used them to focus on research objects and unifying vehicles, now developing into a development paradigm. This article will discuss service activities related to optimizing border tourism potential through the concept of gastrodiplomacy in Kelurahan Sekanak Raya. The method used is to empower border communities with the aim of improving the community's economy by exploiting the existing border potential gastrodiplomacy through Focus Group Discussions (FGD).*

#### Keyword:

Tourism; Border;  
Gastrodiplomacy

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan pada masyarakat perbatasan sangat memerlukan keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, masyarakat itu sendiri dan stakeholders lainnya untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang ingin dicapai. Sering yang menjadi permasalahan hampir di setiap wilayah perbatasan Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan baik dalam hal kesejahteraan maupun tingkat pendapatan perkapita, apabila di bandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan sebagainya (Yusuf 2013).

Media masa juga seringkali memberitakan tentang angin puting beliung memporak-porandakan pemukiman nelayan, abrasi pantai, banjir pasang, sampai rendahnya hasil tangkapan nelayan sehingga nelayan berhenti melaut (Haryanto 2008). Dari semua itu sepertinya yang paling terkena dampak adalah masyarakat perbatasan. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena faktor alamiah saja tetapi juga akibat ulah manusia khususnya masyarakat perbatasan pantai sendiri. Mereka hanya berorientasi jangka pendek, hanya memanfaatkan hasilnya tanpa berusaha untuk menjaga dan merawatnya.

Sebenarnya, di dalam wilayah laut dan perbatasan tersebut terkandung sejumlah potensi sumberdaya yang besar dan beragam. Salah satu sumberdaya tersebut dapat diperbarui (*renewable resources*), seperti ikan, udang, moluska, karang mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove dan hewan karang yang keberadaannya dan kelestariannya tergantung dari pelestarian habitatnya (Haryanto 2008). Selain hal tersebut juga berguna dalam jasa-jasa lingkungan (*environmental service*), seperti tempat-tempat (habitat) yang indah dan menyejukkan untuk potensi peristiwa serta rekreasi, kemudian juga sebagai wilayah media transportasi laut (Haryanto 2008).

Provinsi Kepulauan Riau tergolong salah satu *cross border tourism* yang paling potensial di Indonesia. Jumlah wisman melalui Provinsi Kepulauan Riau tercatat lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta menurut data Kementerian Luar Negeri Mei 2019. Total wisman melalui Provinsi Kepulauan Riau tercatat 1.337.067 lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta yang hanya 946.509 wisman (Jatmika 2021).

Potensi pariwisata perbatasan di Kepulauan Riau memiliki ciri khas dengan potensi pariwisata perbatasan daerah lainnya di Indonesia. Ciri khas nya yaitu terdiri atas pulau-pulau. Pulau Batam dan Bintan telah menjadi destinasi perbatasan yang cukup terkenal di Provinsi Kepulauan Riau, namun dalam implementasinya, konsep pariwisata perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau belum menemukan titik temu pada tahapan konsep *border tourism* yang berciri khas kan pulau-pulau yang berbeda dengan wilayah perbatasan lainnya di Indonesia (Arieta et al. 2022).

Peta jalan pengembangan pariwisata perbatasan dikenal dengan istilah *Cross Border Tourism Development (CBTD)*. Peta jalan tersebut dapat disusun berdasarkan (Martiani 2018):

1. Aktualisasi ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, and Media*) dalam konteks pariwisata.
2. Implementasi 3A pariwisata, yaitu: Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi di Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
3. Promosi event lintas batas dalam kalender nasional maupun internasional.
4. Penguatan Generasi Pariwisata Indonesia (GENPI) dan Masyarakat Sadar Wisata Wilayah Perbatasan.
5. Penghargaan dan insentif untuk Kabupaten/Kota/Provinsi yang berhasil mengembangkan CBTD

Menyadari potensi dan permasalahan di bidang perbatasan, kelautan dan perikanan tersebut maka saat ini sudah mulai ada perubahan paradigma terhadap pengelolaan sumberdaya perbatasan, kelautan dan perikanan, yang semula memanfaatkannya berfokus pada objek penelitian dan wahana pemersatu, kini berkembang menjadi paradigma pembangunan yang mengembangkan sumberdaya perbatasan, kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru serta

mendukung kesejahteraan pada pelaku pembangunan secara adil, dengan tetap mempertahankan terpeliharanya daya dukung dan kelestarian sumberdaya perbatasan, kelautan dan perikanan.

Partisipasi masyarakat menjadi semakin penting dalam proses pengambilan keputusan. Apabila masyarakat belum mampu atau tidak berdaya untuk menjalankan hak-haknya, termasuk ikut aktif dalam penyusunan atau perumusan kebijakan apapun seperti Peraturan Desa dan lainnya, maka pemerintah dan *stakeholders* lainnya harus memberikan sosialisasi atau pemberdayaan kepada masyarakat (Nurhadiyanti 2022). Pemberdayaan dapat dilakukan dengan adanya modal sosial yang terdapat dalam masyarakat. Modal sosial adalah hubungan antar manusia, yaitu orang-orang yang melakukan tindakan terhadap satu sama lain karena kewajiban sosial dan timbal balik, solidaritas sosial, dan komunitas. Modal sosial inilah yang menjadi perekat yang menyatukan masyarakat. Oleh karena itu, suatu pemberdayaan akan berhasil jika memperkuat *civil society* atau masyarakat madani, yaitu struktur formal dan semi formal yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas inisiatif sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari masyarakat (Nurhadiyanti 2022).

Usulan pengabdian ini akan membahas mengenai rencana kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan optimalisasi potensi perbatasan yang ada di Kelurahan Sekanak Raya. Telah dilakukan program pemberdayaan masyarakat perbatasan di Desa ini dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi perbatasan yang ada secara berkelanjutan. Peningkatan potensi ekonomi ini merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dimana pembangunan berkelanjutan adalah suatu agenda pembangunan yang menjadi kerja global. Optimalisasi potensi perbatasan melalui pendekatan pariwisata diharapkan mampu memberikan peningkatan program pemberdayaan masyarakat. Adapun indikator dalam optimalisasi potensi pariwisata perbatasan ialah pertama; atraksi yang menunjukkan objek daya Tarik wisata yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/*artificial*, kedua; aksesibilitas yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi, ketiga; amenitas yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata. Fasilitas umum yang mendukung kegiatan pariwisata (Asthu 2020).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Sekanak Raya adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat perbatasan terkait pengelolaan potensi yang ada di Kelurahan untuk mendapatkan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat Kelurahan.

Atas masalah tersebut, dipandang perlu untuk melakukan kegiatan yang sifatnya aplikatif dan memiliki output yang terukur. Oleh sebab itu, sebagai langkah taktis untuk menjawab masalah di atas adalah melakukan diskusi kelompok kecil (FGD) mengenai pemberdayaan masyarakat perbatasan yang output dari kegiatan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir dan tindakan bagi masyarakat perbatasan. Terkait permasalahan pemberdayaan masyarakat perbatasan, solusi yang ditawarkan adalah memberikan FGD atau diskusi kelompok kecil terkait dengan pemberdayaan masyarakat perbatasan dalam merencanakan pembangunan destinasi pariwisata di Kelurahan Sekanak Raya Kota Batam. Materi pemantik FGD ini lebih kepada upaya untuk merancang perencanaan pariwisata perbatasan di Kelurahan Sekanak Raya melalui pemberdayaan masyarakat perbatasan Perbatasan di Kelurahan Sekanak Raya.

## **METODE**

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan yang paling menentukan adalah adanya peran pemerintah untuk mendukung kegiatan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan baik berupa seminar, Focus Grup Discussion (FGD), pelatihan, dan pendampingan bagi masyarakat desa. Dalam hal kegiatan ini tim pengabdian mengambil metode FGD dengan melakukan diskusi kelompok kecil dengan masyarakat Kelurahan Sekanak Raya, Kota Batam sehingga terciptanya komunikasi dua arah yang menghasilkan umpan balik atas kondisi yang ada dan kondisi yang ideal di

lapangan untuk dicarikan jalan tengah berupa solusi yang relevan sesuai konteks kegiatan pengabdian ini. Keadaan mitra sebelum diberi pemaparan FGD yakni masih dalam proses pemetaan potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, selain itu keadaan mitra sudah melakukan pengembangan potensi melalui aktivitas pribadi, misalnya dengan menggunakan akun media sosial pribadi untuk memasarkan produk kuliner rumahan yang dibuat, namun mitra tidak menyadari itu adalah salah satu strategi marketing yang berpotensi untuk dilakukan saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri yang dilalui tim pengabdian secara umum berjalan dengan lancar. Diskusi dan umpan balik yang diterima terbangun dengan sistem diskusi kelompok kecil. Beberapa gambaran umum serta temuan dari diskusi dan umpan balik tersebut akan dipaparkan dalam sub bab ini. Berawal dari gambaran Pulau Belakang Padang, kondisi etnografis, serta potensi yang bisa mengangkat Pulau Belakang Padang untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata maritim di Provinsi Kepulauan Riau.

Kecamatan Belakang Padang merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administratif Kota Batam dengan wilayah yang mencakup lebih dari 100 pulau. tiga terluar, yaitu Pulau Nipah, Pulau Pelampong dan Pulau Batu Berhanti (Perpres78/2005). Selain itu, Kecamatan Belakang Padang juga memiliki Sedangkan 6 titik garis pangkal wilayah Kepulauan Indonesia yang berada di Pulau Nipah (2 titik), Pulau Pelampong (1 titik), Pulau Batu Berhanti (1 titik), Karang Helen Mars dan Karang Benteng (PP 38/2002).

Kecamatan Belakang Padang Memiliki luas laut yang lebih besar dari pada daratan dengan luas daratan 69,12 km<sup>2</sup> dan luas lautan 512,428 km<sup>2</sup> (Bidang Pemutaran Dasar Rupabumi –PDRTR-Bakosurtanal TA 2006). Pulau Belakang Padang merupakan salah satu bagian dari gugusan pulau terdepan di jalur lintas pelayaran internasional Selat Malaka dengan memiliki 6 wilayah administratif di tingkat kelurahan. Wilayah ini merupakan perbatasan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Pulau ini terletak tepat di persimpangan antara Selat Malaka dengan Selat Singapura. Ketika Pulau Sambu dan Pulau Batam dibangun Pemerintah Indonesia era Presiden Soeharto, masyarakat Belakang Padang sangat berkembang.



Gambar 1. Sesi FGD oleh Ketua Tim Pengabdian

Kedekatan geografis dengan Selat Malaka dan Singapura, membuat pulau ini memiliki kehidupan sosial yang terpengaruh langsung dari kedua negara jiran tersebut. Dapat dikatakan kehidupan sosial Masyarakat Pulau Belakang Padang banyak tergantung dengan negara Jiran tersebut, termasuk dalam hal wisatawan mancanegara.

Pulau Belakang Padang juga memiliki Sejarah yang unik, Pulau ini diklaim menjadi cikal bakal lahirnya Pulau Batam yang kini menjadi kota industri. Berawal dari wilayah administratif berupa Kelurahan pada tahun 1957 dibawah wilayah administratif Kecamatan Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Riau, Pulau Belakang Padang menjadi wilayah administratif Kecamatan pada tahun 2004 saat Provinsi Kepulauan Riau resmi terbentuk.

Komposisi etnografi di Pulau Belakang Padang tidak hanya didominasi oleh satu etnis saja. Tercatat bahwa dua etnis besar di pulau ini yakni Melayu dan Tionghoa hidup berbaur. Perkembangan Pulau Belakang Padang semakin signifikan pada saat Pulau Sambu dan Pulau Batam mulai menjadi konsentrasi Pemerintah Pusat di era Presiden Soeharto. Dengan dijadikannya Batam sebagai kota industri membuat era urbanisasi warga Pulau Belakang Padang ke Batam untuk mencari penghidupan yang layak. Dalam perkembangannya warga Pulau Belakang Padang yang sukses di perantauan tetap Kembali ke Pulau Belakang Padang untuk menjenguk kerabat atau keluarga, sehingga pada tahap inilah muncul sebutan Pulau Belakang Padang sebagai Pulau Penawar Rindu.

Sebutan Pulau Penawar Rindu inilah yang menjadi ciri khas bagi para wisatawan yang hendak mengunjungi Pulau Belakang Padang. Bentuk destinasi berupa pulau dan terletak di wilayah terluar atau perbatasan, membuat Pulau Belakang Padang dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata maritim.

Berdasarkan data yang diperoleh selama Pengabdian Kepada Masyarakat, hal yang menjadi potensi untuk dikembangkan guna memajukan pariwisata berbasis maritim di Pulau Belakang Padang ialah mengombinasikan aspek pariwisata maritim dengan kuliner khas yang berasal dari Pulau Belakang Padang.

Beberapa jenis kuliner khas dari Pulau Belakang Padang yang dapat dijadikan sebagai penunjang pengembangan pariwisata maritim di Pulau ini ialah:

1. Cendol Botak.
2. Mie Lendir.
3. Prata.
4. Penaram yang menjadi khas dari Pulau Kasu (termasuk wilayah administratif Pulau Belakang Padang).
5. Laksmana Mengamuk.
6. Rujak Buk Lak.

Selain beberapa makanan khas di atas, terdapat juga potensi dari Pulau Belakang Padang yang dapat dikembangkan untuk menjadi potensi pengembangan pariwisata maritim. Potensi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Tempat Penampungan Awal Ikan
2. Pintu Pengecekan aneka hasil laut (seafood)
3. 80% warga Pulau Belakang Padang ialah pelaku UMKM.

#### **a. Peta Jalan Pengembangan Pariwisata Maritim**

Potensi pariwisata perbatasan di Kepulauan Riau memiliki ciri khas dengan potensi pariwisata perbatasan daerah lainnya di Indonesia. Ciri khas nya yaitu terdiri atas pulau-pulau. Pulau Batam dan Bintan telah menjadi destinasi perbatasan yang cukup terkenal di Provinsi Kepulauan Riau, namun dalam implementasinya, konsep pariwisata perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau belum menemukan titik temu pada tahapan konsep *border tourism* yang berciri khas kan pulau-pulau yang berbeda dengan

wilayah perbatasan lainnya di Indonesia (Arieta et al. 2022).

Peta jalan pengembangan pariwisata perbatasan dikenal dengan istilah *Cross Border Tourism Development* (CBTD). Peta jalan tersebut dapat disusun berdasarkan (Martiani 2018):

1. Aktualisasi ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, and Media*) dalam konteks pariwisata.
2. Implementasi 3A pariwisata, yaitu: Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi di Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
3. Promosi event lintas batas dalam kalender nasional maupun internasional.
4. Penguatan Generasi Pariwisata Indonesia (GENPI) dan Masyarakat Sadar Wisata Wilayah Perbatasan.
5. Penghargaan dan insentif untuk Kabupaten/Kota/Provinsi yang berhasil mengembangkan CBTD

Menyadari potensi dan permasalahan di bidang perbatasan, kelautan dan perikanan tersebut maka saat ini sudah mulai ada perubahan paradigma terhadap pengelolaan sumberdaya perbatasan, kelautan dan perikanan, yang semula memanfaatkannya berfokus pada objek penelitian dan wahana pemersatu, kini berkembang menjadi paradigma pembangunan yang mengembangkan sumberdaya perbatasan, kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru serta mendukung kesejahteraan pada pelaku pembangunan secara adil, dengan tetap mempertahankan terpeliharanya daya dukung dan kelestarian sumberdaya perbatasan, kelautan dan perikanan.

Dari pemaparan materi FGD dapat ditemukan potensi perencanaan pariwisata perbatasan di Kelurahan Sekanak Raya dapat dikembangkan menjadi implementasi 3A yaitu; Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Potensi yang bisa dikembangkan yakni aksesibilitas. Aksesibilitas disini adalah terkait aktivitas bagaimana pariwisata dan produk pariwisatanya bisa diakses dengan mudah oleh pelancong. Dalam hal ini ide kreatif dan kemasan menjadi hal yang menarik ditemukan dalam proses FGD tersebut. Banyak ide-ide dan komunikasi kreatif yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kelurahan Sekanak Raya, namun kelompok masyarakat tersebut tidak menyadari bahwa aktivitas tersebut adalah potensi untuk diteruskan. Aktivitas tersebut seperti pemasaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kelurahan Sekanak Raya melalui akun-akun pribadi media sosial, namun karena tidak dianggap sebagai potensi, maka ide dan komunikasi kreatif tersebut tidak dilakukan secara ajeg.



Gambar 2. Sesi Penyampaian Materi Perencanaan Pariwisata Perbatasan di Kantor Kelurahan Sekanak Raya

Adapun temuan tim yang didapat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah keinginan Masyarakat untuk mengangkat kuliner lokal sebagai daya tarik baru dalam mengembangkan potensi pariwisata maritim di daerah ini. Dalam kajian Sosial-Politik, khususnya Hubungan Internasional, kajian kuliner lokal untuk diangkat sebagai isu sering ditemukan dalam konsep diplomasi makanan atau lebih dikenal dengan istilah *gastrodiplomacy*.

Beberapa literatur seperti tulisan dari (Effendi:2011) mengangkat *gastrodiplomacy* sebagai sarana untuk diplomasi public untuk mengangkat citra suatu negara dalam aspek pengembangan industri pariwisata. Konsep mengenai *gastrodiplomacy* muncul pertama kali dalam artikel yang berjudul “*food as ambassador*” (The Economist:2002) yang merupakan surat kabar mingguan terkemuka London pada tahun 2002. Adalah Paul Rockowel dan Sam Chapple-Sokol yang merupakan penulis dari artikel tersebut, berbicara mengenai strategi suatu negara, yang berdiplomasi melalui makanan. Paul Rockwel mengatakan bahwa makanan dapat merubah persepsi manusia dan membangun citra sebuah negara.

Berbicara mengenai pembentukan citra, diplomasi publik juga erat kaitannya dengan citra *nation-brand* suatu negara. Konsep ini lahir ketika ada keyakinan bahwa ada aktor-aktor lain selain negara, yaitu aktor non-negara yang juga dapat membantu menjalankan roda kehidupan kerjasama suatu negara. Kerjasama akan tercipta baik jika citra negara yang dihadirkan kepada masyarakat internasional juga baik. Kemudian dapat dilihat bahwa analisa yang dipaparkan oleh Effendi dan analisa Anholt dalam bukunya yang berjudul *Places: Identity, Image, and Reputation*, bahwa kedua penulis ini sama-sama berbicara mengenai konsep diplomasi publik yang berkaitan erat dengan peningkatan citra suatu negara, baik dalam sisi internal maupun eksternal (Anholt:2009).

Kemudian Brian Hurn dan Barry Tomalin dalam bukunya yang berjudul *Cross Cultural Communication: Theory and Practice* yang penulis buku simpulkan bahwa diplomasi kuliner atau yang lebih dikenal dengan *gastrodiplomacy* bukan sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah, melainkan sebagai akibat dari munculnya keaktifan aktor-aktor non-negara seeperti pemilik modal, perusahaan swasta hingga para *chef* yang menjadi aktor penting yang secara aktif menjalankan perannya melalui promosi makanan kedalam dan luar negeri (Hurn & Tomalin:2013).

### **b. Sinergitas Konsep Pariwisata Maritim dan Gastrodiplomasi**

Menelaah peta jalan pengembangan pariwisata perbatasan dikenal dengan istilah *Cross Border Tourism Development* (CBTD) yang dikembangkan oleh (Martiani 2018) sebagai berikut:

1. Aktualisasi ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, and Media*) dalam konteks pariwisata.
2. Implementasi 3A pariwisata, yaitu: Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi di Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
3. Promosi event lintas batas dalam kalender nasional maupun internasional.
4. Penguatan Generasi Pariwisata Indonesia (GENPI) dan Masyarakat Sadar Wisata Wilayah Perbatasan.
5. Penghargaan dan insentif untuk Kabupaten/Kota/Provinsi yang berhasil mengembangkan CBTD.

Kondisi Pulau Belakang Padang dengan memiliki kuliner yang khas dapat dijadikan potensi untuk pengembangan pariwisata maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Merujuk pada aktualisasi ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, and Media*), prospek UMKM di Pulau Belakang Padang khususnya UMKM dibidang kuliner bisa dikembangkan dari sudut pandang ekonomi menengah. Selain itu dalam indikator implementasi 3A Pariwisata yakni: Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, kuliner

khas dapat dijadikan indikator atraksi dalam mengembangkan potensi pariwisata maritim di Pulau Belakang Padang.

Dalam perspektif gastrodiplomacy, kuliner khas dapat dijadikan sarana diplomasi public yang bisa meningkatkan atraksi wisatawan ke Pulau Belakang Padang.

**Grafik 1. Tahapan Pelaksanaan Diplomasi Publik**



Sumber: Mark Leonard, *Public Diplomacy*: 2002

## SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh selama Pengabdian Kepada Masyarakat, hal yang menjadi potensi untuk dikembangkan guna memajukan pariwisata berbasis maritim di Pulau Belakang Padang ialah mengombinasikan aspek pariwisata maritim dengan kuliner khas yang berasal dari Pulau Belakang Padang. Adapun temuan tim yang didapat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah keinginan Masyarakat untuk mengangkat kuliner lokal sebagai daya tarik baru dalam mengembangkan potensi pariwisata maritim di daerah ini. Dalam kajian Sosial-Politik, isu ini sering ditemukan dalam konsep diplomasi makanan atau lebih dikenal dengan istilah *gastrodiplomacy*.

Kondisi Pulau Belakang Padang dengan memiliki kuliner yang khas dapat dijadikan potensi untuk pengembangan pariwisata maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Merujuk pada aktualisasi ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, and Media*), prospek UMKM di Pulau Belakang Padang khususnya UMKM dibidang kuliner bisa dikembangkan dari sudut pandang ekonomi menengah. Selain itu dalam indikator implementasi 3A Pariwisata yakni: Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, kuliner khas dapat dijadikan indikator atraksi dalam mengembangkan potensi pariwisata maritim di Pulau Belakang Padang.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyukseskan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini antara lain: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tim Pengabdian, dan Panitia Kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anholt, Simon. 2009. *Handbook on Tourism Destination Branding*. Spanyol: World Tourism Organization.
- Arieta, Siti et al. 2022. "Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8(3 SE-Articles). <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/2151>.
- Asthu, Agita. 2020. "PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN PARIWISATA." *Jurnal Sositeknologi* 19: 75.
- Effendi, Tonny Dian. 2011. *Diplomasi Publik Jepang Perkembangan dan Tantangan*. Bogor, Ghalia.
- Haryanto, Rudi. 2008. "Rehabilitasi Hutan Mangrove: Pelestarian Ekosistem Pesisir Pantai Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 14(2): 148–60.

- Hurn, Brian J and Barry Tomalin. (2013). *Cross- Cultural Communication*. New York: Palgrave Macmillan
- Jatmika, Aningtias. 2021. "Bangun Wisata Dari Perbatasan, Ini 8 Destinasi Cross Border Tourism Unggulan Indonesia." <http://kompas.com.https://travel.kompas.com/read/2021/04/07/170500727/bangun-wisata-dari-perbatasan-ini-8-destinasi-cross-border-tourism-unggulan?page=all> (June 16, 2023).
- Leonard, M. (2002). *Diplomacy by Other Means*. *Foreign Policy*, 132, 48–56. <https://doi.org/10.2307/3183455>
- Martiani, Ana Westy. 2018. "Roadmap Cross Border Tourism Development (CBTD) : Membangun Pariwisata Dari Perbatasan." <https://indonesiadevelopmentforum.com/.https://indonesiadevelopmentforum.com/2020/knowledge-center/detail/1548-1548-roadmap-cross-border-tourism-development-cbtd-membangun-pariwisata-dari-perbatasan> (June 16, 2023).
- Nurhadiyanti, Nurhadiyanti. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga." *Tanah Pilih* 2(1): 62–74.
- Yusuf, Muh Jufri. 2013. "Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Nunukan." *eJournal Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul* 1(4): 1594–1607.